

Kajian Teologis Tentang Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Dampaknya Pada Jemaat

¹Martha Garera, ²Helen Gratia Masambe

¹Fakultas Teologi Universitas Krsiten Indonesia Tomohon

² Fakultas Teologi Universitas Krsiten Indonesia Tomohon

Email: ¹Marthagarera7@gmail.com

Diterima tanggal: 15 November 2023, Disetujui Tanggal: 8 Januari 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out exactly what identity politics is and especially to know the practices of identity politics in the 2020 election of regional heads in South Minahasa Regency and its impact in the life of the GMIM Efrata Pinamorongan congregation. Basically, this study wants to re-examine the understanding of politics from the congregation, especially which has deviated from the basis and purpose of politics, which is to provide common welfare. In this study, the author uses a qualitative research method by collecting research data based on observations, interviews, and literature studies. And the results of the study show that the GMIM Efrata Pinamorongan congregation is involved in the practice of identity politics.

Keywords: GMIM; Identity; Politics; Regional Heads; Theology

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara benar apa itu politik identitas dan terlebih khusus mengetahui praktik-praktik politik identitas pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 dampaknya di tengah kehidupan jemaat GMIM Efrata Pinamorongan. Pada dasarnya penelitian ini ingin memeriksa kembali pemahaman tentang politik dari jemaat terkhususnya yang telah menyimpang dari dasar dan tujuan dari politik, yaitu untuk memberikan kesejahteraan bersama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data penelitian berdasarkan pada pengamatan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, jemaat GMIM Efrata Pinamorongan terlibat dalam praktik politik identitas.

Kata Kunci: GMIM; Identitas; Kepala Daerah; Politik; Teologi

PENDAHULUAN

Politik tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia baik bergereja maupun bermasyarakat, oleh karena manusia hidup dalam sebuah negara yang membuat kita memiliki hak dan tanggungjawab baik sebagai jemaat dalam kehidupan bergereja, maupun sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang. Aristoteles mengulas secara panjang lebar mengenai kewarganegaraan, warga dan konstitusi. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang-orang yang terlibat dalam seluruh aktivitas politik. Keterlibatan tersebut misalnya memangku jabatan deliberatif dan yudikatif yang bertujuan untuk mencapai kecukupan diri di dalam sebuah negara. Ia juga berpendapat bahwa politik adalah usaha dari warga negara untuk kebaikan bersama.¹

Secara teologis, dalam setiap kali proses politik, terdapat *kairos*. Proses-proses politik itu adalah saat-saat yang menentukan bagi rakyat terutama mereka yang miskin dan tertindas. Gereja sebagai komunitas moral memiliki peran politis yang signifikan. Dalam bentuk praktiknya gereja sebisa mungkin memberikan contoh dalam partisipasinya di dunia politik dan juga menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat.² Tanggung jawab politis secara moral ini adalah sebuah keharusan bagi gereja-gereja di Indonesia sebagai komunitas iman para murid Yesus karena terkait secara langsung dengan kesetiaan Gereja-Gereja sendiri dalam menghayati imannya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Namun, meskipun demikian, agama harus mengambil jarak dari negara, mendorong loyalitas terbatas pada negara, tetapi tetap memelihara hak untuk menghakimi.³ Dalam hal ini gereja bukan tampil sebagai “pemain” politik, tetapi lebih pada khasanah politik beretika agar gereja juga mengetahui dan peduli pada kehidupan bernegara, bukan hanya kehidupan bergereja saja. Membahas terkait kontestasi politik yang tersaji di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang menarik. Heterogenitas bangsa Indonesia menjadi hal tersendiri yang perlu menjadi sorotan. Sebagai negara dengan keanekaragaman, Indonesia harus mewaspadai hal-hal yang dapat melemahkan persatuan bangsa.⁴ Karena, dalam proses mendapatkan kemenangan dalam pertandingan politik tentunya butuh instrumen kuat untuk mendapatkan kemenangan. Identitas Ras, Etnis, Suku, Agama pun menjadi barang unik ketika ajang perebutan politik berjalan. Hasil riset Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa identitas agama yang berbeda cenderung membedakan perilaku memilih dalam pemilihan umum di Indonesia,⁵ tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020.

¹ Winarno Winarno, “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi,” *HUMANIKA* 21, no. 1 (3 Januari 2015): 84, <https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.56-62>.

² Andheralvi Isaiyah Lontoh dan Kristi Esandra Tangel, “Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen,” *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 98, <https://doi.org/10.46965/jtc.v7i2.2275>.

³ David C. Legee, *Agama dalam politik Amerika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 33.

⁴ Andheralvi Isaiyah Lontoh dan Yudha Nugraha Manguju, “Politik Kewargaan Sebagai Perwujudan Dari Pancasila Untuk Mengatasi Persoalan Keadilan Dalam Indonesia Sebagai Negara Yang Plural,” *Pute Waya : Sociology of Religion Journal* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 85, <https://doi.org/10.51667/pwjsa.v4i2.1682>.

⁵ Wawan Ichwanuddin, “Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI” <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763>, (diakses pada 24 April 2023 pukul 10:52 WITA).

Pada tanggal 09 Desember tahun 2020 di tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dilaksanakan Pilkada yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada empat Kabupaten, yakni Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Minahasa Utara serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota, yaitu Manado, Bitung, dan Kota Tomohon. Pemilihan umum di kabupaten Minahasa Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakilnya yaitu; Michaela Elsiana Paruntu MARS dan Ventje Tuela S.Os dengan nomor urut satu, Royke Sondakh S.E dan Ir. Harits Andry Umboh M.Si dengan nomor urut dua, dan Franky Donny Wongkar S.H dan Pdt. Petra Yani Rembong S.Th dengan nomor urut tiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan tetapi menekankan karakter alamiah sumber data. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan cara menganalisis persoalan politik identitas yang terjadi di desa Pinamorongan terlebih khusus dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di GMIM Efrata Pinamorongan. Dalam pengumpulan data, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis lakukan selama melaksanakan penelitian, yaitu: pengamatan (observasi), wawancara, dan studi kepustakaan.

HASIL PEMBAHASAN

Gereja dan Politik Identitas

Gereja mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan politik. orang-orang biasanya mengartikan gereja sebagai institusi, sebagaimana ia menampakkan diri melalui, dan dalam organisasi dan segala susunannya (jemaat, klasis, sinode, persekutuan gereja-gereja dan sebagainya). Pemahaman itu sendiri tidaklah salah, karena bagaimanapun jika diasumsikan gereja menampakkan diri di atas ranah sejarah. Namun di pihak lain, gereja lebih dari sekadar institusi. Gereja mempunyai watak organisasi. Artinya, gereja sebagai objek iman diyakini sebagai yang hidup oleh kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam hati anggota-anggotanya. Merekalah yang saling menghidupkan persekutuan. Dengan demikian, eksistensi gereja tidaklah bergantung dari adanya kesepakatan para anggota untuk membentuk diri sebagai gereja, tetapi karena Kristus berkata “aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman” (Mat, 28:20).⁶

Politik, idealnya adalah untuk menata kehidupan masyarakat sebagai warga negara dalam mencapai tujuan bernegara, jaminan terhadap pelayanan publik, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara,⁷ akan tetapi kemudian menjadi sangat birokratis, dimana terampasnya hak-hak dasar hidup rakyat dan legislasi tindakan kekerasan. Sehingga orang-orangpun kemudian mengidentifikasi politik sebagai kerja kotor untuk keuntungan dan kenikmatan diri dan kelompok sendiri. Padahal, politik seperti itu adalah sebuah bentuk penyimpangan terhadap proses melanjutkan kehidupan bersama dalam sebuah negara. Dalam

⁶ Andreas Anangguru Yewangoe, *Agama dan kerukunan* (BPK Gunung Mulia, 2001), 162.

⁷ Denni H. R. Pinontoan, *Gereja yang Berpijak dan Berpihak* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013), 121.

kondisi yang memprihatinkan ini, peran aksi serta pemikiran politik Kristen menjadi penting. Gereja yang membawa misi Allah, yaitu damai sejahtera, ada dan berada dalam kenyataan sejarah itu. Bahwa, dalam perjalanan hidup bernegara telah terjadi berbagai ketidakadilan, diskriminasi, marginalisasi, yang kebanyakan di antaranya dilegitimisasi oleh kekuasaan politik rezim. Politik dan gereja sebenarnya merupakan hal yang baik. Proses yang salahlah yang kemudian membuat terjadinya penyimpangan pada gereja dan politik. Maka dari itu panggilan gereja untuk berpolitik, atau memberi sikapnya dalam politik negara ini adalah sebuah keharusan pelayanan gereja.⁸ Gereja memiliki keharusan untuk menciptakan damai sejahtera di negara ini, Untuk itu gereja seharusnya memberikan pendidikan politik yang benar kepada anggota jemaat, agar supaya anggota jemaat dapat berpolitik dengan cara yang benar.

Tujuan Gereja hadir di dunia ini bukan hanya sebagai ritual keagamaan semata, akan tetapi sebagai instrumen Allah yang dibawa ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan dan kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena itu Gereja diutus ke dunia ialah untuk mengubah kehidupan pribadi dan sosial di masyarakat. Jikalau dilihat dari kaca mata politis, fungsi Gereja bukanlah sebagai “Politik kekuasaan” akan tetapi sebagai politik moral dalam membangun Indonesia yang makmur dan menjadi tempat tinggal bersama bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, budaya, ras, dan agama.

Identitas adalah hal yang signifikan dalam kehidupan manusia, yang pembentukannya dapat terbentuk secara parsial maupun interaksial. Secara filosofis, konsep ini memiliki dua pengertian: (1) *singleness over time* dan (2) *sameness amid difference* yang menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam pengertian identitas. Dalam kategorinya identitas terbagi ke dalam dua hal utama, yakni: identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan citizenship).⁹ Secara etimologis, identitas berasal dari kata *identity* yang dialih bahasakan menjadi identitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri¹⁰. Dengan demikian identitas merupakan keadaan manusia yang mampu menemukan berbagai jenis ciri-ciri khas yang dimiliki dari penggabungan sisi dalam diri dengan kondisi luar dirinya dan lingkungan sosial. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai- nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya Perda Syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama

⁸ Pinontoan, 123–124.

⁹ Edwi Sosiawan, “Representasi Politik Identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 3 (30 Desember 2015): 236, <https://doi.org/10.31315/jik.v13i3.1462>.

¹⁰ KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBB)” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/identitas> , diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, 10:45 WITA)

tertentu. Terkait dengan Politik identitas, sebenarnya tidak diketahui siapa yang pertama kali yang menciptakan istilah dari Politik Identitas sampai hari ini. Awalnya, Politik identitas lahir dari sebuah bentuk reaksi dari ketidakadilan yang dialami kelompok minoritas karena arogansi kelompok mayoritas dalam sosial masyarakat.¹¹

Penyelenggaraan pemilihan umum seringkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sering menghalalkan segala cara, sehingga agamapun seringkali dikorbankan. Dan pada proses pemilu inilah yang seringkali menjadi titik utama perpecahan antara masyarakat Indonesia dengan semangat nasionalisme dan keagamaan di Indonesia. Pemerintah juga seringkali lalai dalam melaksanakan kebijakan yang adil dan bijaksana dengan kerakusan mereka sendiri, sehingga politik identitas seringkali dijadikan senjata yang paling ampuh untuk mendapatkan suara rakyat. Penggiringan opini masyarakat melalui media sosial menciptakan perpecahan bagi bangsa ini. Padahal tidak dapat dipungkiri, bahwa agama mayoritas di Indonesia telah lama mengamalkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, seperti disetujuinya Pancasila sebagai landasan negara hingga toleransi dalam beragama dengan mengakui keberadaan agama minoritas. Isu-isu mengenai politik identitas harus dilihat siapa, apa dan bagaimana kepentingan itu mendasarinya. Kepentingan kelompok elit yang menggunakan politik identitas untuk mengangkat kembali isu primordialisme dengan menjebak fanatisme seseorang atau kelompok dalam hal keagamaan telah melahirkan perpecahan yang begitu besar dan menjadi ancaman bagi nasionalisme negara. Pertentangan politik identitas kemudian diperkeruh¹² dengan berbagai pemberitaan di media massa yang saling menuding kebenaran dan kesalahan dari kedua belah pihak. Peningkatan jumlah pemberitaan, bahkan dalam hitungan menit menyebabkan tidak terkendalinya isu mengenai politik identitas dan memunculkan persoalan baru tentang penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya bahkan sebagian besar berisi kebohongan (hoax). Hoax ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar bagi meruncingnya pertentangan antara kelompok nasionalis dan agama.

Terpancingnya kelompok masyarakat awam dengan pemberitaan hoax menyebabkan masyarakat mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kembali rasionalitas dan kebenarannya. Hal ini kemudian berujung kepada maraknya aksi persekusi yang saling menjatuhkan pihak yang dianggap sebagai lawan politiknya. Ketidaktepatan arah kebijakan dalam menangani pertentangan politik identitas ini dapat menyebabkan matinya penegakkan demokrasi di Indonesia. Sehingga segala bentuk perpecahan yang mungkin ditimbulkan dari kedua kelompok politik identitas ini harus dapat diminimalisir melalui peran pemerintah dan juga masyarakat. Adapula dampak yang akan ditimbulkan dari praktik politik identitas menurut Siti Kholisoh seperti yang dikutip oleh Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional antara lain:

- Polarisasi sosial yang membuat kelompok identitas Masyarakat terpecah.
- Perlakuan tidak setara yang membuat batasan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi bebas warganegara dalam demokrasi.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, ed. oleh Martin Sinaga (Jakarta: Democracy Project, 2012), 154.

¹² Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama | Request PDF," *ResearchGate*, 22 Oktober 2024, 23, <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>.

- Psikologi sosial masyarakat. Masyarakat menjadi mudah tersinggung, gampang terbakar emosi, dan rentan terprovokasi.
- Politik Identitas berpotensi mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat.
- Politik Identitas menutupi perdebatan program kerja berkualitas
- Politik Identitas lebih banyak memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Para pendukung merasa identitas mereka adalah kelompok pilihan ciptaan “terbaik” yang akan menyelesaikan masalah di daerahnya.¹³

Pergumulan Gereja Terkait dengan Politik Identitas

Politik identitas sejatinya adalah sebuah strategi dalam perpolitikan untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, baik itu persamaan suku, budaya, agama, marga, bahasa, golongan dan lain sebagainya. Dalam hal politik identitas menjadi berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sering sekali politik identitas menjadikan masyarakat dipecah-belah menurut perbedaan latar belakang hidup sosial, agama, kebudayaan. Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah status, antara masyarakat yang berstatus lebih tinggi dan juga masyarakat yang berstatus lebih rendah. Kelas-kelas dan sekat-sekat sosial terbentuk dalam suatu sistem sosial. Perbedaan status sosial menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya memperkuat semangat diskriminatif sosial yang membabi buta. Hal ini terjadi dikarenakan manusia menganggap dirinya lebih tinggi daripada sesamanya, merasa lebih berhak daripada yang lain, sehingga terjadi proses perendahan harkat dan martabat sesama, yang sebenarnya secara hakikatnya sama.¹⁴ Gereja dan orang-orang Kristen sebagai bagian dari politik Indonesia, secara normatif adalah bagian sah dari politik kenegaraan yang setara dengan kelompok warga negara yang lain. Namun, dalam konteks menguatnya politik identitas, orang-orang Kristen terkonstruksi menjadi 'kelompok minoritas' secara nasional, dan di wilayah tertentu adalah kelompok mayoritas'. Secara nasional maupun lokal, dengan menguatnya 'politik identitas', maka baik secara politik, sosial dan ekonomi tercipta segrasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas. Ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi menyasar kelompok-kelompok minoritas identitas.¹⁵

Dalam praktiknya, politik sangat dekat dengan kekuasaan. Memang secara teoritik normatif, pengertian politik adalah teknik atau strategi untuk mengelola kekuasaan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Saut Hamonangan Sirait menyimpulkan bahwa, “politik adalah untuk perwujudan kedaulatan rakyat melalui pembuatan keputusan yang dilakukan rakyat bagi kehidupan pencapaian cita-cita bersama.”¹⁶ Gereja bergumul dengan politik identitas seperti diskriminasi yang dialami oleh warga negara yang memiliki identitas Kristen atau Gereja secara umum. Dan juga bergumul dalam menyikapi kecenderungan yaitu para elit

¹³ I. Putu Sastra Wingarta dkk., “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (29 Desember 2021): 119, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.

¹⁴ William Chang, “Makna kesatuan dalam keberagaman,” dalam *Etos dan Moralitas Politik* (Yogyakarta: KANISIUS, 2005), 138.

¹⁵ Dr Djoys Anneke Rantung, “TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2018): 26, <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.21>.

¹⁶ Sirait Saut, *Politik Kristen di Indonesia Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 29.

politik Kristen yang sering memanfaatkan simbol dan jaringan umat sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan. Gereja seharusnya menjalankan peran kenabian agar bersama-sama dengan kelompok lain memperjuangkan keadilan sosial. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dalam rangka panggilan dan pengutusan untuk menjadi berkat maka ia memiliki tanggung jawab politik yang dipahami sebagai praksis teologis untuk semua orang. Dalam konteks Indonesia, semua orang adalah setiap warga negara yang padanya melekat identitas agama dan etnis. Dasar pemahaman inilah yang melandasi gereja untuk merespon menguatnya politik identitas yang berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok sendiri. Politik identitas ini seperti yang muncul dalam fenomena politik praktis bermasalah bagi ideal dan usaha pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ruang publik Indonesia adalah 'medan kesaksian' gereja untuk keadilan demi shalom. Gereja dalam teologi politiknya menyatakan kesaksian Injil dalam solidaritas untuk orang-orang yang menderita; untuk mereka yang didiskriminasi dan lebih luas untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dalam situasi yang tidak menentu atau tidak damai.¹⁷

Gereja sebagai tubuh Kristus perlu berhati-hati terhadap bahaya politik identitas, yang dapat saja terjadi ketika pertimbangan suku, suka/tidak suka, kelompok, dan keluarga memengaruhi strategi pelayanan di Gereja. Strategi berbasis politik identitas dapat berpengaruh buruk pada persekutuan jemaat dan bahkan persekutuan para pelayan gereja (pendeta, penatua, diaken, dan pengajar). Dalam pelayanan gerejawi dan kecenderungan nepotisme menjadi gejala yang kuat terasa. Di dalam Perjanjian Baru tidak menganggap bahwa negara harus menandingi Allah. Warga negara Kristen wajib setia kepada pemerintah (Roma 13:1 dst), dan harus berdoa untuk seluruh pejabatnya (1 Tim 2:2), "agar dapat hidup dalam tenang dan tenteram".¹⁸ Dari fakta sejarah, ada keterlibatan beberapa tokoh yang beragama Kristen dalam ranah politik seperti, Desmond Mpilo Tutu, Martin Luther King, Jr., Elisabeth Fry, William Wilberforce, John Calvin, yang mengubah dunia dan telah meninggalkan sejarah perjuangan atas ketidakadilan dan kebenaran, yang sangat mengagumkan. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah mengizinkan keterlibatan orang percaya dalam dunia politik. Pelajaran pentingnya adalah bahwa kekristenan jangan alergi terhadap politik. Beberapa alasan adalah politik dari segi normative merupakan hal yang mulia. Dalam pengertian bahwa keadilan dan kebenaran menjadi tujuan politik harus mendapat tempat dihati orang Kristen untuk diperjuangkan tanpa mengenal lelah. Kemudian keterlibatan dalam dunia politik telah diawali dengan sebuah panggilan perjuangan atas ketimpangan atau persoalan sosial sebagai motivasi dan dunia politik merupakan sarana mencapai tujuan itu. Orang Kristen bahkan pelayan khusus dapat mengambil bagian dalam dunia politik sebagai keterpanggilannya atas dunia dan menebarkan terang di dalam Kristus sebagai patokan etis dalam menangani masalah dunia, asalkan ia tetap dalam memperjuangkan hak normatif sebagai motivasi murninya dan meninggalkan politik praktis yang berpusat kepada kekuasaan dengan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan.

¹⁷ Saut, 30.

¹⁸ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, Etika* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 308.

Berdasarkan Roma 13:1-3, Halim menuliskan bahwa: setiap warga negara memiliki tanggung jawab politik, dan juga sebaliknya pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya untuk menegakkan keadilan dan keamanan serta mengatasi semua teror-teror yang bersifat politik maupun agama. gereja perlu untuk mengikuti perkembangan politik.¹⁹ Politik berupa strategi menempatkan orang di dalam struktur yang ada mengandaikan bahwa struktur yang ada dapat dipengaruhi, sehingga dengan Bahasa ideal dikatakan “bernafaskan semangat Kristen yaitu cinta kasih dan keadilan”. Atau dengan Bahasa praktis dapat dikatakan “membela kepentingan Kristen”. Landasannya juga dapat dilihat pada kata-kata Yesus dalam Perjanjian Baru, yaitu agar murid-murid-Nya menjadi “terang dan garam” (Mat. 5:13, 14). Jadi, dengan kata lain ialah menjadi garam di dalam dunia politik.²⁰ Dalam dunia politik dan hukum, sikap gereja yang perlu dikembangkan adalah sikap positif, kritis, dan kreatif. Positif artinya memandang dunia politik dan hukum sebagai bidang pengabdian dan pelayanan panggilan dari Tuhan karena itu berasal dari pandangan positif ketika memberikan kontribusi sesuai iman Kristen. Kritis artinya tidak ragu-ragu memberi kritik jika penguasa berbuat kesalahan, menyimpang dari hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Kritik yang sesuai dengan etika kristen adalah kritik yang konstruktif (membangun, santun, dan memperdayakan), bukan kritik yang destruktif (menjatuhkan, vulgar, dan mencari kesalahan).

Gereja bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lain tidak boleh menyerahkan moralitas politik kepada elit politik saja. yang dibutuhkan adalah moral politik yang benar-benar menjaga harkat dan martabat manusia. Keterlibatan gereja dalam politik adalah untuk menegakkan dimensi moral dalam politik. Politik tanpa moral yang baik akan selalu menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas sesama manusia. Gereja harus menjadi penjaga yang efektif dalam dunia politik agar harga manusia tidak direduksi dan didistorsi.²¹ Gereja harus kreatif, maksudnya gereja perlu berusaha memberikan terobosan atau alternatif baru di tengah kebuntuan terhadap politik maupun hukum. Gereja diharapkan mampu berkomunikasi terbuka dan dialogis, tidak alergi terhadap perubahan. Selain itu, gereja juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang politik dan hukum antara lain: Gereja perlu terlibat dalam politik dan hukum dalam arti yang luas, gereja mengikuti dengan berbagai perkembangan politik dan hukum. Gereja perlu melakukan pertemuan yang bersifat konsultatif secara berkala dengan anggota-anggota jemaatnya yang terlibat dalam politik dan hukum praktis dan terlibat dalam forum-forum dialog antar umat beragama.

Sikap orang Kristen terhadap politik ada tiga yaitu, bersifat antagonistis, rejektif, dan menyesuaikan. Respon yang benar itulah yang lebih penting dan menentukan sikap orang percaya terhadap berbagai gejolak politik yang terjadi. Allah menghendaki orang Kristen taat kepada pemerintah, sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Allah. Pemerintah harus mempertanggungjawabkannya kepada pemberi kekuasaan yaitu Allah sendiri (ayat 1). Jika orang Kristen tidak taat kepada pemerintah dan berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab maka citra

¹⁹ Halim Makmur, *Terror, Terroris, dan Terrorisme* (Batu: Shalom Publisher, 2010), 68–69.

²⁰ Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia* (BPK Gunung Mulia, 2000), 20.

²¹ Th. Sumartana, “Panggilan Gereja dalam Reformasi Politik di Indonesia,” dalam *Struggling in Hope* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 208.

kekristenan akan rusak. Orang Kristen harus menghormati kewibawaan pemerintahan dunia selama kebijakan itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tetapi kebijakan itu tidak boleh mengambil alih kewibawaan atau wewenang Allah. Bagaimana seharusnya orang Kristen sebagai warga negara menaati lembaga-lembaga resmi negara yang mengatur kehidupan masyarakat dalam usahanya menegakkan kebenaran dan keadilan kesejahteraan masyarakat ditulis di Roma 13:13. Orang Kristen harus mengakui lembaga pemerintahan yang diadakan oleh karena kehendak Allah (ayat 1). Panggilan tersebut tentu menuntut peran aktif, yang harus dimulai dari pasal 12, yaitu penyerahan diri kepada Allah (Roma 32:7) Dengan demikian pemerintah dapat berperan sebagai hamba Allah (Roma 13:4). tanggung jawab gereja (dalam pengertian umat Allah, bukan dalam pengertian organisasi) supaya memampukan pemerintah menjadi hamba Allah. Hal ini dapat terjadi hanya apabila orang Kristen memenuhi panggilannya. Jadi sudah seharusnya orang percaya menjawab panggilan itu, untuk menjadi garam dan terang dunia, biar melalui diri orang percaya, citra Kristus boleh terpancar sehingga semua orang memuji dan memuliakan Allah.

Kajian Teologis Tentang Politik Identitas dalam Gereja

Jemaat begitu antusias dalam menyambut Pilkada 2020 yang ditandai dengan perbincangan-perbincangan, maupun melalui postingan lewat sosial media. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemilihan ini jemaat tidak terlepas dari praktik politik identitas. Politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan sehingga di saat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Di saat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan yang pada mulanya adalah *base on identity* (Identitas) dan *base on interest* (kepentingan) telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas ialah karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan sehingga mengorbankan persatuan dan kesatuan jemaat. Mayoritas jemaat Efrata di Pinamorongon masih kurang memahami konsep perbedaan agama, suku, golongan dll. Karena realitas politik Identitas ini sudah terjadi secara turun-temurun dalam kehidupan jemaat Efrata Pinamorongon hal itulah yang seringkali membuat anggota jemaat tidak menyadari dan merasa bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Sehingga anggota jemaat bertindak keras kepala dan menganggap jika ada orang lain yang tidak memilih kandidat yang memiliki golongan yang sama dengan mereka maka, orang tersebut pantas untuk disalahkan dan berakhir dengan tindakan diskriminasi kepada anggota jemaat tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Zainal Abidin Bagir dalam “Pluralisme Kewarganegaraan” Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar

kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas.²² dampak dari Isu Politik Identitas ini sudah terasa sejak masa kampanye, terlebih di saat salah satu anggota calon legislatif yang menghadiri undangan ibadah pada 12 oktober 2020 yang diselenggarakan di gedung gereja Efrata Pinamorongon. Dimana hal ini mengundang berbagai tanggapan dari anggota jemaat yang setuju dan tidak setuju. Mereka menganggap bahwa gereja seharusnya tidak memberikan peluang untuk gereja dijadikan panggung dalam permainan politik. Sedangkan, di lain pihak menganggap hal seperti ini adalah wajar-wajar saja, selama mereka tidak menggunakan ornamen-ornamen partai dalam peribadatan dan tidak mengganggu jalannya peribadatan. Adapula dampak lain yang muncul; yang pertama yaitu perpecahan dari anggota jemaat, kemudian dirangkaikan dengan aksi saling menyerang dengan lontaran kalimat penghinaan, terciptanya berita-berita *hoax*, ujaran kebencian yang dilontarkan antara anggota jemaat satu sama lain. Yang kedua, anggota jemaat yang cenderung memandang salah warga jemaat yang tidak memilih kandidat calon yang sama dengan mereka dan juga terjadi tindakan diskriminasi kepada anggota jemaat tersebut.

Dampak dari praktik politik identitas ini juga muncul dalam lingkup keluarga dimana terjadinya pemaksaan hak dan kehendak dari orangtua kepada anak, hingga berakhir kepada permasalahan panjang sampai saat ini. Ini menandakan ketika keputusan pemilihan yang terlalu didominasi oleh latar belakang agama dan golongan yang sama dan kurangnya sikap yang saling menghormati pilihan satu sama lain sebagai sesama anggota keluarga membuat rusaknya keharmonisan di dalam keluarga, pertengkaranpun terjadi karena dipicu oleh isu politik identitas ini. Tugas pelayan khusus merupakan bagian dari tugas panggilan gereja yakni, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Konflik yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat di GMIM Efrata Pinamorongon yang membuat rusaknya tali ikatan persaudaraan antar jemaat harus segera diperbaiki. Untuk itu pelayan khusus yang telah menerima panggilan Yesus Kristus harus mengambil langkah untuk mengatasi konflik ini. seperti wawancara yang telah dipaparkan di atas yaitu pelayan khusus terus memperingatkan anggota jemaat baik dalam penyampaian melalui pelayanan firman, pelayan khususpun melakukan pengembalaan dengan cara mengunjungi rumah anggota jemaat yang terlibat dalam konflik. Karena, pengembalaan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atas panggilan Allah, agar supaya dapat mencapai klimaks yang positif dapat memberikan pemahaman kepada anggota jemaat secara pribadi sesuai dengan firman Tuhan.

Politik identitas sejatinya adalah sebuah strategi dalam perpolitikan untuk mendapatkan suara terbanyak dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, baik itu persamaan suku, budaya, agama, marga, bahasa, golongan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan PILKADA tahun 2020 di kabupaten Minahasa Selatan, Jemaat GMIM Efrata Pinamorongon tidak terlepas dari isu politik identitas yang pada hal ini menjadi berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, di mana politik identitas menjadikan anggota jemaat dipecah-belah menurut perbedaan latar belakang hidup sosial, agama, kebudayaan. Anggota jemaat yang cenderung berlandaskan kesamaan latar belakang mereka yaitu se-agama, se-golongan, sesuku dan lain-lain. Yang menjadi permasalahannya adalah anggota jemaat yang memaksakan

²² Fachrudin Achmad, *Konflik Politik Identitas (Pergumulan Politik, Agama dan media dari Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019)* (Jakarta: Literasindo, 2021), 11.

pilihan orang lain dan mendiskriminasi jemaat yang berbeda pilihan dengan mereka. Hal ini menyebabkan munculnya konflik di tengah jemaat. Politik yang dilandasi dari inspirasi biblis adalah sebuah hal yang sangat diperlukan untuk mendorong dan membela hak-hak asasi manusia, serta memahami arti politik itu secara benar. Sudah seharusnya politik menjadi kekuatan moral karena kekuasaan yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip moral yang akar dan sumbernya adalah Allah sendiri. Alkitab sebagai Kitab Suci yang memberikan inspirasi kepada pemikiran kristiani tentang politik sebagai makna yang positif. Kekuasaan politik dalam pandangan Kristen mengalir dari Allah dan menjadi bagian dari keteraturan yang ingin diciptakan Allah. Allah menghendaki sebagai tanggapan manusia dalam nuraninya dan lakukan dalam kehidupan sosial yang ditandai dengan kebenaran, keadilan, kebebasan, dan solidaritas. Hal ini akan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang damai. Tuhan menciptakan manusia beragam, mulai dari suku, bangsa, ras, bahasa dan lain sebagainya. Dari berbagai perbedaan tersebut manusia ditugaskan untuk saling mengenal satu sama lain, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Perbedaan adalah suatu ketentuan dari Tuhan, perbedaan ini bukan sesuatu keanehan, namun perbedaan ini adalah sesuatu keindahan yang mesti disyukuri dan tidak seharusnya bagi manusia untuk saling membeda-bedakan. Bahkan Allah sendiri memberikan sebuah contoh pendekatan politik yang dengan bentuk pola relasi dan komunikasi sosial yang lebih humanistik dan melampaui pola-pola relasi komunikasi masyarakat yang feodalistik dan paternalistik.²³

Kejadian 1: 26-27, “Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”. Yang berarti Allah menciptakan manusia dalam ‘kesegambaran’ dan ‘keserupaan’ dengan semua potensi yang dimiliki oleh manusia, karena manusia diberikan keistimewaan dari Allah dengan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Tidak hanya itu manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu seseorang diharuskan untuk saling bersosialisasi dan menjalin hubungan, baik antar individu maupun kelompok. Meskipun dari latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, ras, adat (SARA) dan tentunya harus tetap menjaga kerukunan dan nilai toleransi antar umat manusia diberi tugas menguasai bumi. Berkuasa artinya manusia tidak hanya menggunakan sumber daya yang ada, namun mengusahakannya untuk menjadi lebih baik. Manusia dianugerahkan kemampuan dan kehendak bebas di bawah kontrol Allah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan oleh karena kemampuan yang dimiliki oleh manusia maka terciptalah suatu kebudayaan (*culture*), dimana kebudayaan merupakan hasil dari interaksi manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain di alam semesta. Kebudayaan, yang berasal dari akar kata multikultural yang pada dasarnya adalah perintah Allah kepada manusia (Kej.1: 28). Tanggung jawab tetap dituntut Allah kepada manusia. Dengan demikian, selain memiliki keistimewaan sebagai ciptaan Tuhan, manusia juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam memelihara kebersamaan dengan sesamanya. Oleh karena itu, setiap manusia wajib dan bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi kesederajatan dalam

²³ Lontoh dan Tangel, “Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8,” 109.

keberagaman yang telah Allah ciptakan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak menghormati atau menerima keberadaan orang lain yang berbeda, sama saja menolak eksistensi Allah sebagai pencipta manusia. Untuk itu sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik dan penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat.

Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang berkepercayaan lain. Jika tidak maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, perbedaan merupakan suatu keniscayaan (sesuatu yang tidak bisa dihindari) terlebih dalam persekutuan jemaat. Untuk itu, pada Galatia 3:28:

“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”

Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah mempersatukan orang percaya di dalam Kristus di dalam satu tubuh, yaitu gereja-Nya. Tujuan dari penebusan Allah adalah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Oleh karena itulah perbedaanlah yang seharusnya mempersatukan jemaat sehingga tidak memandang sebelah mata terhadap sesama. Tuhan menciptakan manusia beragam, mulai dari suku, bangsa, ras, bahasa dan lain sebagainya. Dari berbagai perbedaan tersebut manusia ditugaskan untuk saling mengenal satu sama lain, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Perbedaan adalah suatu ketentuan dari Tuhan, perbedaan ini bukan sesuatu keanehan, namun perbedaan ini adalah sesuatu keindahan yang mesti disyukuri dan tidak seharusnya bagi manusia untuk saling membeda-bedakan. Selama seseorang berada dalam Kristus dia adalah saudara. Entah entah dari suku mana ia berasal, latar belakang seperti apakah orang tersebut maka tetaplah ia adalah saudara seiman didalam Tuhan. Setiap orang yang mengakui dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat yang turun ke dunia dalam misi penebusan maka dia adalah murid Kristus tanpa peduli latar belakang identitasnya seperti apa.

KESIMPULAN

Politik identitas yang berkembang di desa Pinamorongan lebih khususnya pada jemaat GMIM Efrata Pinamorongan sangat didominasi oleh politik identitas berbasis agama, golongan, suku, dan ras. Dampak dari adanya politik identitas ini adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa setiap umat telah membuat kelompok-kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan kesamaan golongan gereja, marga, golongan, suku, keluarga dan lain sebagainya yang membawa identitas tertentu atas nama kelompok masing-masing. Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting bagi Jemaat Efrata Pinamorongan dalam bersikap terhadap elektabilitas pasangan calon. Dalam gereja yang majemuk yang secara organisasi sudah seharusnya memiliki tujuan yang sama

demi kepentingan bersama. Perasaan yang superioritas dan mayoritas yang penulis jelaskan diatas menjadi faktor perpecahan karena pihak yang merasa mayoritas akan kurang memperhitungkan golongan-golongan yang minoritas. Faktor ini baik secara sadar dan tidak sadar akan membuat jurang pemisah antar kedua atau bahkan beberapa kelompok, sehingga sifat sentimen dan kecurigaan akan menghantui setiap kelompok yang berbeda. Sehingga politik yang pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keteraturan, melindungi hak-hak semua umat manusia, serta menjaga keamanan dan perdamaian yang semakinhari mulai memudar dan tidak berjalan dengan prinsip yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fachrudin. *Konflik Politik Identitas (Pergumulan Politik, Agama dan media dari Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019)*. Jakarta: Literasindo, 2021.
- Chang, William. "Makna kesatuan dalam keberagaman." Dalam *Etos dan Moralitas Politik*. Yogyakarta: KANISIUS, 2005.
- Guthrie, Donald. *Teologi Perjanjian Baru 3: Eklesiologi, Eskatologi, Etika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Legee, David C. *Agama dalam politik Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Lestari, Yeni Sri. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama | Request PDF." *ResearchGate*, 22 Oktober 2024.
<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, dan Yudha Nugraha Manguju. "Politik Kewargaan Sebagai Perwujudan Dari Pancasila Untuk Mengatasi Persoalan Keadilan Dalam Indonesia Sebagai Negara Yang Plural." *Pute Waya : Sociology of Religion Journal* 4, no. 2 (31 Desember 2023): 84–96. <https://doi.org/10.51667/pwjsa.v4i2.1682>.
- Lontoh, Andheralvi Isaiah, dan Kristi Esandra Tangel. "Gerakan Pembebasan Allah Melalui Kristus dalam Roma 8 : 31-39 Sebagai Dasar Berpolitik Orang Kristen." *Jurnal Teologi Cultivation* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 96–111.
<https://doi.org/10.46965/jtc.v7i2.2275>.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Disunting oleh Martin Sinaga. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Makmur, Halim. *Terror, Terroris, dan Terrorisme*. Batu: Shalom Publisher, 2010.
- Pinontoan, Denni H. R. *Gereja yang Berpijak dan Berpihak*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2013.
- Rantung, Dr Djoys Anneke. "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36972/jvow.v2i1.21>.
- Saut, Sirait. *Politik Kristen di Indonesia Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Singgih, Emmanuel Gerrit. *Iman dan politik dalam era reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sosiawan, Edwi. "Representasi Politik Identitas Dalam Kampanye Online Calon Legislatif Partai Politik Peserta Pemilu 2014." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 3 (30 Desember 2015): 234–48. <https://doi.org/10.31315/jik.v13i3.1462>.
- Sumartana, Th. "Panggilan Gereja dalam Reformasi Politik di Indonesia." Dalam *Struggling in Hope*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Winarno, Winarno. "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi." *HUMANIKA* 21, no. 1 (3 Januari 2015): 56–62.
<https://doi.org/10.14710/humanika.21.1.56-62>.
- Wingarta, I. Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I. Wayan Mertadana, dan Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (29 Desember 2021): 117–24.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.
- Yewangoe, Andreas Anangguru. *Agama dan kerukunan*. BPK Gunung Mulia, 2001.